



Badung Tanggung Kekurangan BOS

Untuk Mewujudkan Sekolah Gratis

MANGUPURA - Kendati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy memperbolehkan melakukan sumbangan di sekolah, namun Bupati Nyoman Giri Prasta tetap melarang permintaan sumbangan maupun pungutan di SMP Negeri dan SD Negeri di Badung ■ ▶ *Baca Badung... Hal 31*

Apa yang tidak bisa dikerjakan dengan dana BOS, nanti akan dibantu melalui dana APBD."

Ketut Widia Astika
Kadisdikpora Badung

Kasek Wajib Dukung Sekolah Gratis

■ BADUNG...

Sambungan dari hal 21

Bahkan, Pemkab Badung memastikan kekurangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan ditanggung melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Badung.

Kadisdikpora Badung Ketut

Widia Astika kemarin (18/1) mengatakan, dari dulu sumbangan diperbolehkan. Yang dilarang adalah melakukan pungutan di sekolah. Dasarnya Permendikbud No 75 Tahun 2016. Di mana, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa sumbangan pendidikan, bantuan pendidikan, tapi bu-

kan pungutan. Namun, kata dia, khusus untuk di Badung tetap mendukung dan menyukseskan program Bupati Badung yakni menerapkan sekolah gratis khusus untuk SMP Negeri dan SD Negeri se-Badung. "Kepala sekolah semua juga harus mendukung (kebijakan sekolah gratis)," terangnya. Kendati sekolah telah diber-

ikan dana BOS senilai Rp 1 juta per siswa selama satu tahun, dana itu hanya cukup untuk standar pelayanan minimal pendidikan. Makanya pemerintahan pusat memperbolehkan melakukan sumbangan. "Apa yang tidak bisa dikerjakan dengan dana BOS, nanti akan dibantu melalui dana APBD," jelasnya. **(dwi/mus)**

Edisi : Kamis, 19 Januari 2017

Hal : 21 dan 31



Radar Bali

Pemanggilan Wali Kota Sah-sah Saja

TERKAIT pemanggilan Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di PD Parkir Kota Denpasar yang bakal digelar hari ini, salah satu kuasa hukum PD Parkir Kota Denpasar, Agus Samijaya, mengatakan pemanggilan tersebut sah-sah saja. Asalkan, katanya, sesuai dengan substansi dari perkara tersebut.

"Ya kalau jaksa mau memanggil pihak lain sah-sah saja. Yang penting kan substansi dari perkara itu. Apakah syarat-syarat perkara itu disidik atau dituntut sudah memenuhi persyaratan?" kata Agus Samijaya saat dihubungi melalui sambungan telepon kemarin petang.

BERSAMBUNG ◀ HAL 7

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi PD Parkir

- **Mencuat** ketika mantan Kajari Denpasar Imanuel Zebua menyebut Dirut PD Parkir I Nyoman Sudiantara atau Punglik sudah jadi tersangka

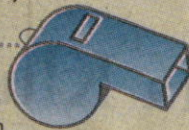
- **Pengungkapan** tersangka oleh Zebua usai sertijab ke Erna Normawati pada 20 Juni lalu dipertanyakan media karena status Zebua bukan Kajari Denpasar lagi

- **Zebua** beralasan penetapan tersangka telah dilakukan sebelum sertijab

- **Erna** menyatakan penetapan tersangka kasus PD Parkir untuk internal penyidikan memang berdasarkan surat penyidikan yang dikeluarkan Zebua sebelum sertijab

- **Penetapan** Punglik sebagai tersangka terkait dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan PD Parkir Kota Denpasar 2014

Kerugian negara sekitar
Rp 11 miliar



- **Dugaan** penyimpangan dalam penempatan uang asuransi PD Parkir yang dikelola oleh Koperasi PD Parkir sejak sembilan tahun lalu

Setiap tahun Rp 500 juta > Selama 9 tahun Rp 4.5 miliar

Total kerugian negara Rp 15.5 miliar

- **Dugaan** penyimpangan berdasarkan perhitungan kejaksaan. Kejari masih menunggu hasil audit BPKP Wilayah Bali terkait penghitungan kerugian negara

- **Hari ini** Kejari menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Denpasar, Rai Mantra, sebagai saksi untuk melengkapi BAP dengan tersangka Punglik



INFOGRAFIS : TRIBUN BALI/PRIMA

Pemanggilan Wali Kota...

Agus mencontohkan syarat-syarat yang dimaksud adalah adanya bukti kerugian negara dari BPKP Provinsi Bali. Apabila belum ada, menurut Agus, perkara tersebut masih prematur.

"Kalau masih prematur, apakah layak kasus ini dilanjutkan?" kata pengacara asal Jawa Barat ini.

Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Erna Normawati Widodo Putri yang sempat diwawancara Selasa (17/1) terkait perkembangan dari BPKP, menyebutkan bahwa pihaknya belum diundang untuk ekspose soal kerugian negara terkait kasus PD Parkir Denpasar. Padahal, kata Erna, Kejari Denpasar sudah bersurat ke BPKP.

"Bahkan kita sudah surati dua kali, ya kita ma-

sih tunggu untuk diundang ekspose," kata Erna. Sembari menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Bali, Kejari Denpasar tetap akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

Kejari Denpasar telah menetapkan I Nyoman Sudiantara atau Punglik sebagai tersangka kasus PD Parkir Kota Denpasar. Punglik sekarang sudah tak lagi menjabat sebagai Dirut PD Parkir Kota Denpasar. Setelah menjabat tiga kali periode sejak 2004, ia turun dari jabatannya per 28 November 2016.

Saat ini jabatan Dirut PD Parkir Denpasar dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) yaitu Nyoman Putrawan. Putrawan sebelumnya sebagai salah satu direksi di PD Parkir Denpasar. (win)

• DARI HALAMAN 1

Edisi : Kamis, 19 Januari 2017
Hal : 7



Radar Bali

Renovasi 7 Gedung SD Dianggarkan Rp 18,5 Miliar

Denpasar (Bali Post)

Sejumlah gedung SD di Denpasar mengalami kerusakan sejak beberapa bulan lalu. Kini, Pemkot Denpasar sudah memastikan akan melakukan perbaikan atau renovasi. Bahkan, anggaran yang disiapkan untuk merenovasi tujuh gedung SD tersebut mencapai Rp 18,5 miliar.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar I Wayan Sukana, Rabu (18/1) kemarin, mengatakan tujuh gedung SD yang akan direnovasi yakni SDN 2 Sumerta, SDN 14 Dangin Puri, SDN 3 Pedungan, SDN 19 Dauh Puri, SDN 11 Kesiman, SDN 13 Kesiman dan SDN 6 Sestan. "Bangunan ini akan dirancang tiga lantai dengan sembilan ruang belajar," katanya.

Saat ini, proses tersebut memasuki tahap melengkapi dokumen tender. Kalau Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) turun pada akhir Januari ini, maka pertengahan Februari akan ditenderkan. Kemudian dari tender tersebut akan mendapatkan pemenang dan itu butuh waktu satu bulan, prosesnya dari Unit Layanan Pengadaan (ULP). Targetnya, pada Agustus 2017 gedung tersebut sudah bisa ditempati.

Ditanya tentang kendala yang dihadapi saat ini, menurut Sukana, pihaknya masih menunggu DPA serta prosesnya. "Saat ini yang terpenting adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga proses tersebut bisa berjalan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang sudah barang tentu tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah tersebut," kata Sukana.

Salah seorang Kepala SDN di Denpasar, I Wayan Sunarma, mengatakan pihaknya berharap semua proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga gedung sekolah bisa cepat terbangun serta proses belajar-mengajar di sekolah bisa kembali berjalan dengan normal dan kondusif. Dengan adanya bangunan yang rusak ini, pihaknya membagi pelajaran menjadi 3 *shift*. Untuk kelas I belajar dari pukul 07.30 sampai 10.00 Wita, kelas II dari pukul 10.00 sampai 12.30 Wita, kemudian setelah kelas V dan VI pulang pukul 12.30 Wita masuklah kelas III dan IV belajar dari siang sampai sore hari. (kmb12)

Edisi : Kamis, 19 Januari 2017

Hal : 2